

JPO Sarinah-Thamrin: Bongkar Pasang Kebijakan Antar Gubernur DKI Jakarta

Ameilya Az-Zahra¹, Canda Della Agustia Disy², Fadiyah Salsabila Putri³, Hayfa Nadira Andriansyah⁴,
Mohammad Rayhan Hidayat⁵, Nabila Amelia Putri Sahira⁶, Nathasha Aurellia⁷, Putri Salsadila⁸,
Abdul Ghofur⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2410413150@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410413006@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410413071@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410413121@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2410413120@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2410414074@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2410413119@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2410413036@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸, abdulghofur@upnvj.com⁹

(Naskah masuk : 20 April 2026, Revisi : 29 Juni 2026, Publikasi : 22 Juli 2026)

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika modifikasi kebijakan pembangunan dan penghancuran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di area Sarinah–Thamrin sebagai cerminan dari perubahan kepemimpinan di DKI Jakarta. Fenomena perubahan kebijakan yang terus-menerus ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam pengelolaan infrastruktur publik, yang berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran, kepastian dalam perencanaan kota, serta kenyamanan warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi perubahan kebijakan serta dampaknya terhadap keberlangsungan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, memanfaatkan data sekunder dari literatur akademis dan informasi media. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kasus JPO Sarinah–Thamrin sebagai representasi hubungan antara pergantian kepemimpinan daerah dan keberlanjutan kebijakan infrastruktur perkotaan, yang masih jarang dikaji dalam studi kebijakan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh preferensi dan visi politik dari masing-masing pemimpin, sehingga kebijakan tersebut belum terinternalisasi dengan baik. Situasi ini mengarah pada ketidakberlangsungan kebijakan, inefisiensi dalam penggunaan anggaran, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kebijakan yang lebih konsisten dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur publik.

Kata kunci: JPO Sarinah, Kebijakan Publik, Konsistensi Kebijakan, Perencanaan Kota, Politik Lokal.

Abstract

This study explores the dynamics of policy changes regarding the construction and demolition of the Pedestrian Overpass (Jembatan Penyeberangan Orang/JPO) in the Sarinah–Thamrin area as a reflection of leadership transitions in the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta). The recurring policy changes indicate inconsistencies in the management of public infrastructure, affecting budget efficiency, urban planning certainty, and public convenience. The objective of this study is to analyze the factors influencing policy changes and their implications for the sustainability of public policies. This research employs a qualitative approach using a case study method and relies on secondary data obtained from academic literature and media reports. The novelty of this study lies in its examination of the Sarinah–Thamrin JPO case as a representation of the relationship between regional leadership transitions and the sustainability of urban infrastructure policies, a topic that remains underexplored in Indonesian public policy studies. The findings reveal that policy changes are strongly influenced by the political preferences and visions of successive leaders, resulting in weak policy institutionalization. This condition leads to policy discontinuity, inefficient use of public funds, and declining public trust in government institutions. Therefore, more consistent and long-term policy planning is needed to ensure the sustainability of public infrastructure development.

Keywords: Local Political Dynamics, Policy Consistency, Public Policy, Sarinah Pedestrian Overpass (JPO), Urban Planning.

1. PENDAHULUAN

Ruang publik di perkotaan merupakan arena strategis yang tidak hanya merefleksikan kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi produk dari proses politik dan kebijakan publik. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, pengelolaan infrastruktur perkotaan, termasuk fasilitas penyeberangan pejalan kaki, sering kali tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan perubahan kepemimpinan. Winarno (2012) menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari aktor yang terlibat dalam proses perumusannya. Oleh karena itu, setiap pergantian pemimpin membawa visi, prioritas, serta pendekatan pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu berkelanjutan. Howlett dan Ramesh (2003) juga menegaskan bahwa perubahan orientasi politik dapat mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan publik yang sedang berjalan.

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah–Jalan M.H. Thamrin. Kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi, bisnis, dan mobilitas tertinggi di Jakarta yang menuntut tersedianya infrastruktur penyeberangan yang aman dan efisien. JPO Sarinah memiliki nilai historis sebagai salah satu fasilitas penyeberangan awal di Jakarta sekaligus simbol perkembangan infrastruktur perkotaan sejak era modernisasi kota. Namun, keberadaannya justru menjadi objek perubahan kebijakan yang berulang dalam waktu relatif singkat.

Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, JPO Sarinah dibongkar dengan alasan penataan ruang kota dan peningkatan aksesibilitas bagi pejalan kaki melalui penerapan pelican crossing. Kebijakan tersebut didasarkan pada gagasan untuk menciptakan ruang publik yang lebih mudah diakses dan memberikan prioritas yang lebih besar kepada pejalan kaki. Namun, pada periode kepemimpinan berikutnya, arah kebijakan tersebut kembali mengalami perubahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kembali JPO di lokasi yang sama dengan pertimbangan utama berupa peningkatan keselamatan pejalan kaki pada kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi (Detik, 2024). Revitalisasi tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas lift guna meningkatkan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas (Liputan6, 2024). Perubahan arah kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas antara pendekatan aksesibilitas horizontal melalui pelican crossing dan pendekatan keselamatan melalui pemisahan ruang antara kendaraan dan pejalan kaki.

Kondisi tersebut menghadirkan problematika yang cukup serius dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan, yaitu inkonsistensi kebijakan publik. Perubahan kebijakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat tidak hanya mencerminkan perbedaan visi antar pemimpin, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Peters (2015) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan yang berlangsung secara berulang dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses perencanaan pembangunan. Di satu sisi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran akibat pembangunan dan pembongkaran fasilitas yang berulang. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna ruang publik dapat mengalami kebingungan akibat perubahan sistem yang tidak stabil. Lebih jauh lagi, fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan belum sepenuhnya terlembaga secara kuat dan masih dipengaruhi oleh preferensi politik para pengambil keputusan (Winarno, 2012).

Menariknya, kasus JPO Sarinah–Thamrin memperlihatkan bagaimana satu infrastruktur yang secara fungsi tergolong sederhana justru mampu merefleksikan dinamika politik lokal yang kompleks. JPO tidak lagi dipahami semata-mata sebagai fasilitas penyeberangan, melainkan menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan dan pendekatan pembangunan kota. Dalam kasus ini terlihat adanya pergeseran cara pandang terhadap ruang publik antara penekanan pada estetika kota, aksesibilitas, dan keselamatan yang berubah mengikuti pergantian kepemimpinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur perkotaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh orientasi politik yang berkembang pada setiap periode pemerintahan (Howlett & Ramesh, 2003).

Sejumlah penelitian dan kajian kebijakan publik telah membahas pentingnya konsistensi dalam pembangunan dan implementasi kebijakan. Howlett dan Ramesh (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi berbagai aktor dan kepentingan yang dapat

berubah sesuai dinamika politik yang berkembang. Sementara itu, Bennett dan Howlett (1992) menekankan bahwa perubahan kebijakan idealnya didasarkan pada proses pembelajaran kebijakan (policy learning) sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan politik jangka pendek.

Dalam konteks implementasi kebijakan, Peters (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan kesinambungan kebijakan dalam jangka panjang. Selain itu, Scott (2014) menegaskan bahwa institusionalisasi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan suatu kebijakan agar tidak mudah berubah akibat pergantian aktor politik. Dengan demikian, kebijakan yang telah terlembaga cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang sangat bergantung pada preferensi individu pemimpin.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan stabilitas kepemimpinan. Penelitian oleh Cairney (2020) menunjukkan bahwa perubahan aktor politik dapat memengaruhi arah kebijakan apabila suatu kebijakan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Penelitian Peters (2021) juga menemukan bahwa kebijakan perkotaan yang bergantung pada preferensi individu pemimpin cenderung mengalami perubahan ketika terjadi transisi kekuasaan. Di Indonesia, studi mengenai tata kelola perkotaan lebih banyak membahas transportasi, revitalisasi ruang publik, dan pembangunan infrastruktur secara umum, sementara kajian yang secara spesifik menelaah hubungan antara pergantian kepemimpinan daerah dan keberlanjutan kebijakan infrastruktur masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjadikan kasus JPO Sarinah–Thamrin sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana perubahan kepemimpinan memengaruhi konsistensi kebijakan publik dalam pembangunan perkotaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan persoalan perubahan kebijakan pada aspek kelembagaan dan proses kebijakan secara umum. Sementara itu, dimensi politik kebijakan yang berkaitan dengan pergantian kepemimpinan serta dampaknya terhadap konsistensi kebijakan infrastruktur perkotaan masih belum banyak dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk menganalisis kasus JPO Sarinah–Thamrin sebagai representasi dinamika politik lokal yang mempengaruhi arah kebijakan publik. Fokus penelitian tidak hanya pada perubahan bentuk infrastruktur, tetapi juga pada bagaimana pergantian gubernur mempengaruhi keberlanjutan kebijakan, efisiensi pembangunan, dan kepastian perencanaan kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab mengapa terjadi bongkar pasang kebijakan antar Gubernur DKI Jakarta terkait pembangunan dan pembongkaran JPO Sarinah–Thamrin, serta bagaimana perubahan kebijakan tersebut memengaruhi konsistensi perencanaan kota dan pemenuhan kebutuhan serta keselamatan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan tersebut serta memahami bagaimana pergantian kepemimpinan mempengaruhi arah kebijakan pengelolaan infrastruktur perkotaan dalam perspektif konsistensi dan keberlanjutan kebijakan publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait konsistensi dan keberlanjutan kebijakan dalam konteks politik lokal. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan infrastruktur yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika perubahan kebijakan JPO Sarinah–Thamrin tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, tetapi juga oleh faktor politik dan preferensi kepemimpinan yang berdampak pada ketidakberlanjutan kebijakan publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis fenomena bongkar pasang kebijakan pembangunan dan pembongkaran JPO Sarinah–Thamrin pada lintas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus yang dikaji secara mendalam untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan serta implikasinya terhadap konsistensi perencanaan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika perubahan kebijakan publik berdasarkan berbagai sumber tertulis.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta pemberitaan media massa yang berkaitan dengan pembangunan dan pembongkaran JPO Sarinah–Thamrin. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan perubahan kebijakan JPO Sarinah–Thamrin. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antara pergantian kepemimpinan, proses perubahan kebijakan, dan dampaknya dapat dianalisis secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan, literatur akademik, dan pemberitaan media massa sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dinamika Bongkar Pasang Kebijakan JPO Sarinah–Thamrin Antar Gubernur

Fenomena perubahan kebijakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di area Sarinah–Thamrin menggambarkan adanya dinamika kebijakan publik yang berkaitan erat dengan pergeseran kepemimpinan di tingkat daerah. Infrastruktur perkotaan yang seharusnya dirancang untuk jangka panjang malah mengalami modifikasi dalam waktu yang relatif singkat, didorong oleh perbedaan visi dan pendekatan pembangunan di antara para gubernur DKI Jakarta. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di tingkat daerah masih rentan terhadap perubahan orientasi politik dari para penguasa. Temuan ini sejalan dengan kajian Iswahyudi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan di Jakarta dapat memicu penghentian atau perubahan kebijakan ketika kebijakan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan preferensi pemimpin maupun pemilih.

Secara kronologis, JPO Sarinah awalnya dirancang untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki di wilayah dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Namun, selama masa kepemimpinan Anies Baswedan, terjadi perubahan kebijakan yang mengarah pada pembongkaran JPO dan penggantian dengan pelican crossing sebagai bagian dari inisiatif penataan kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki (Walkable City). Peralihan ini menekankan pada aksesibilitas horizontal yang dianggap lebih inklusif bagi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Selain itu, penelitian Mulyadi et al. (2022) mengenai kawasan Sudirman–Thamrin menunjukkan bahwa Jakarta mulai menggeser paradigma pembangunan transportasi ke arah yang lebih memprioritaskan pejalan kaki. Temuan tersebut memperkuat alasan bahwa perubahan dari JPO ke pelican crossing dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperbaiki walkability kawasan pusat kota.

Meskipun demikian, kebijakan ini kembali mengalami perubahan di bawah

kepemimpinan yang baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membangun kembali atau merevitalisasi JPO Sarinah. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan keselamatan dan kebutuhan aksesibilitas, terutama untuk penyandang disabilitas dan warga lansia. Revitalisasi JPO juga dilengkapi dengan fasilitas lift dan tetap mempertahankan pelican crossing sebagai pilihan penyeberangan (Liputan6, 2024).

Namun, kajian Mulyadi et al. (2024) di kawasan Dukuh Atas menunjukkan bahwa kualitas walkability tidak hanya ditentukan oleh keberadaan jalur pejalan kaki, tetapi juga oleh aspek keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterhubungan fasilitas. Dengan demikian, keberadaan JPO, pelican crossing, maupun lift perlu dipahami sebagai bagian dari desain fasilitas pejalan kaki yang saling melengkapi, bukan sekadar pilihan yang saling menggantikan.

Selain itu, pembangunan kembali JPO didasari oleh tingginya volume lalu lintas di kawasan Thamrin yang berpotensi menjadi bahaya bagi pejalan kaki jika hanya mengandalkan penyeberangan di permukaan (Detik, 2024). Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai adanya inkonsistensi dalam perencanaan kota, mengingat JPO sebelumnya telah dibongkar untuk mendukung konsep kota yang bersahabat dengan pejalan kaki (IDN Times, 2024).

Perubahan kebijakan yang berlangsung cepat ini menggambarkan adanya perbedaan orientasi kebijakan antara para pemimpin. Di satu sisi, pendekatan walkable city mengedepankan kemudahan akses dan integrasi ruang publik. Di sisi lain, pendekatan yang berfokus pada keselamatan lebih menekankan pemisahan ruang sebagai upaya perlindungan bagi pejalan kaki. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang serupa, namun diterapkan melalui kebijakan yang berbeda. Studi Napitupulu dan Rudiarto (2025) tentang TOD Dukuh Atas juga menunjukkan bahwa peningkatan walkability membutuhkan dukungan pembangunan kawasan yang berorientasi transit. Hal ini relevan dengan Sarinah-Thamrin karena kebijakan penyeberangan di kawasan pusat kota sebaiknya tidak dilihat terpisah dari konektivitas transportasi umum dan penataan ruang publik.

Dinamika ini tidak dapat dipisahkan dari peran aktor politik sebagai pengambil keputusan utama. Pergantian kepemimpinan membawa perubahan dalam preferensi, prioritas, serta cara pandang terhadap pengelolaan ruang kota. Ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik di tingkat daerah masih sangat dipengaruhi oleh visi masing-masing pemimpin, dibandingkan dengan perencanaan yang sudah terlembaga dengan kuat.

Dalam konteks ini, fenomena pembongkaran dan pembangunan kembali JPO Sarinah-Thamrin dapat dilihat sebagai tanda awal adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dinamika ini lebih lanjut dalam kaitannya dengan konsistensi dan keberlanjutan dalam kebijakan publik.

3.2. Konsistensi Kebijakan Bongkar Pasang JPO Sarinah-Thamrin

Dalam kajian kebijakan publik, konsistensi kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dijalankan secara selaras dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, baik dari aspek tujuan, arah, maupun implementasinya. Konsistensi ini mencerminkan adanya policy continuity, yaitu kesinambungan kebijakan yang tidak mudah berubah akibat pergantian aktor ataupun dinamika politik jangka pendek (Howlett & Ramesh, 2003). Dengan kata lain, kebijakan yang konsisten seharusnya tidak bergantung pada preferensi individu, melainkan terlembaga dalam sistem yang stabil dan berorientasi jangka panjang (Hill & Hupe, 2002).

Policy integration menjadi penting dalam kasus ini karena kebijakan JPO menyentuh beberapa tujuan sekaligus, yaitu keselamatan, aksesibilitas, mobilitas, dan tata ruang. Cejudo dan Michel (2021) menjelaskan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan instrumen yang saling mendukung agar tidak berjalan terpisah, sementara Trein et al. (2023) menekankan perlunya evaluasi dan hubungan antarsektor dalam kebijakan yang terintegrasi.

Jika ditinjau dari implementasinya, kebijakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menunjukkan inkonsistensi kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya pola pembongkaran kemudian diikuti dengan pembangunan ulang dalam bentuk atau pendekatan yang berbeda. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya kesinambungan kebijakan antar periode, dimana setiap pergantian

kepemimpinan cenderung membawa arah kebijakan baru tanpa integrasi dengan kebijakan sebelumnya. Dalam perspektif ini, perubahan kebijakan lebih mencerminkan pengaruh aktor dibantingkan stabilitas kebijakan (Peters, 2015).

Bentuk inkonsistensi tersebut dapat dilihat dari dua hal utama. Pertama, adanya pembongkaran dan pembangunan ulang fasilitas yang menunjukkan tidak optimalnya kebijakan sebelumnya. Kedua, perubahan pendekatan kebijakan yang dilakukan tanpa didasarkan pada evaluasi jangka panjang yang komprehensif. Pergeseran ini cenderung bersifat reaktif dan tidak menunjukkan adanya perencanaan yang berkelanjutan yang seharusnya menjadi bagian dari siklus kebijakan publik (Dunn, 2018).

Inkonsistensi kebijakan ini berdampak pada berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, terjadi inefisiensi anggaran karena alokasi sumber daya publik tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dari sisi sosial, perubahan kebijakan yang tidak konsisten menimbulkan kebingungan di masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap penggunaan diri terhadap penggunaan fasilitas publik. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kondisi ini mencerminkan lemahnya kebijakan pemerintah, dimana kebijakan tidak berkembang menjadi sistem yang mapan melainkan tetap bergantung pada preferensi aktor politik yang sedang berkuasa.

Pada tingkat perencanaan daerah, Putra et al. (2024) menekankan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan regional agar program pemerintah tidak berjalan parsial. Apabila prinsip ini diterapkan pada kasus JPO Sarinah-Thamrin, kebijakan penyeberangan pejalan kaki seharusnya memiliki arah yang jelas dan tetap terhubung dengan rencana mobilitas kota jangka panjang.

3.3. Keberlanjutan Kebijakan & Dampaknya

Keberlanjutan kebijakan merujuk pada kemampuan suatu kebijakan untuk bertahan dan dilaksanakan secara konsisten, meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan atau prioritas politik. Kebijakan yang berkelanjutan harus didasarkan pada perencanaan jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh siklus politik jangka pendek yang dapat mengarah pada ketidakpastian. Sebagaimana dijelaskan oleh Peters (2015), keberlanjutan kebijakan membutuhkan stabilitas dalam implementasi dan terus-menerus beradaptasi dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat.

Hasibuan dan Mulyani (2022) menjelaskan bahwa pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta membutuhkan integrasi antara kawasan transit, mobilitas pejalan kaki, dan perencanaan ruang kota. Artinya, keberlanjutan kebijakan JPO tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya jembatan, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut mendukung sistem transportasi perkotaan secara menyeluruh.

Kebijakan terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah-Thamrin, sebagaimana yang telah terjadi dalam beberapa periode pemerintahan, menunjukkan ketidakberlanjutan dalam penerapannya. Keberlanjutan kebijakan dapat dianalisis dari dua aspek utama: perencanaan jangka panjang dan perubahan kebijakan yang terlalu cepat. Kebijakan JPO yang dibongkar dan dibangun ulang dalam waktu singkat menunjukkan kurangnya perencanaan jangka panjang yang matang. Hal ini mengarah pada ketidakstabilan dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan yang seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Seperti yang diungkapkan oleh Peters (2015), kebijakan yang tidak memiliki konsistensi dalam perencanaan dan implementasi berisiko menimbulkan ketidakpastian, baik dalam aspek perencanaan kota maupun pengelolaan anggaran. Perubahan yang cepat dari satu kebijakan ke kebijakan lain, seperti pembongkaran JPO untuk menggantinya dengan pelican crossing dan kemudian membangunnya kembali sebagai JPO, mencerminkan bahwa kebijakan tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika politik jangka pendek daripada visi perencanaan kota yang berkelanjutan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, seperti yang juga dicatat oleh Howlett dan Ramesh (2003), yang menyatakan bahwa kebijakan yang cepat berubah menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat dan mengurangi efisiensi pembangunan.

Perubahan kebijakan yang tidak berkelanjutan berpotensi menambah ketidakstabilan

dalam perencanaan kota. Sebagai contoh, pembongkaran dan pembangunan ulang JPO Sarinah berulang kali menunjukkan bahwa perencanaan kota DKI Jakarta cenderung dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan dan bukan oleh rencana yang terlembaga dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai penggunaan fasilitas publik. Kebijakan yang tidak berkelanjutan juga membawa dampak terhadap efisiensi pembangunan. Pembongkaran JPO yang diikuti dengan pembangunan ulang menyebabkan pemborosan anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk proyek infrastruktur lainnya yang lebih membutuhkan perhatian. Seperti yang dijelaskan oleh Peters (2015), kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan seharusnya memiliki orientasi pada penggunaan anggaran yang efisien.

Kebijakan yang berubah-ubah juga berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Misalnya, pembongkaran JPO untuk mengganti dengan pelican crossing dianggap meningkatkan aksesibilitas bagi pejalan kaki, namun keputusan ini diikuti oleh pengembalian ke JPO dengan alasan keselamatan pejalan kaki, terutama di kawasan dengan lalu lintas tinggi. Masyarakat yang awalnya telah terbiasa dengan satu jenis fasilitas penyeberangan akan merasa bingung dan tidak nyaman dengan perubahan yang sering terjadi.

Ketidakpastian dalam kebijakan yang berubah-ubah mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Winarno (2012), perubahan kebijakan yang terus-menerus tanpa evaluasi jangka panjang menciptakan ketidakstabilan dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan publik. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Temuan Fitryantica dan Syam (2025) juga menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan dan instrumen kebijakan dapat melemahkan konsistensi kebijakan, akuntabilitas pemerintah, serta kepercayaan publik. Dengan demikian, kasus JPO Sarinah-Thamrin memperlihatkan pentingnya evaluasi kebijakan yang lebih terbuka agar perubahan fasilitas publik tidak dipahami masyarakat sebagai kebijakan yang berubah-ubah tanpa dasar yang jelas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bongkar pasang kebijakan JPO Sarinah-Thamrin merupakan refleksi dari kuatnya pengaruh pergantian kepemimpinan terhadap arah kebijakan infrastruktur perkotaan di DKI Jakarta. Perubahan kebijakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat menunjukkan belum kuatnya institusionalisasi kebijakan sehingga keberlanjutan pembangunan masih bergantung pada preferensi politik masing-masing pemimpin. Akibatnya, muncul risiko inefisiensi anggaran, ketidakpastian perencanaan kota, serta menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perencanaan yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang agar kebijakan infrastruktur tetap berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector and Rejuvenating Democracy*. Cambridge University Press.
- Bennett, C. J., & Howlett, M. (1992). The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change. *Policy Sciences*, 25(3), 275–294.
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy: Theories and Issues* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Cejudo, G. M., & Michel, C. L. (2021). Instruments for policy integration: How policy mixes work together. *SAGE Open*, 11(3), 21582440211032161. <https://doi.org/10.1177/21582440211032161>
- Detik. (2024). JPO Sarinah akan Dibangun Lagi, Bagaimana Nasib Pelican Crossing? <https://news.detik.com/berita/d-8299588/jpo-sarinah-akan-dibangun-lagi-bagaimana-nasib-pelican-crossing>

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Fitryantica, A., & Syam, R. M. (2025). Bridging policy and law: Harmonizing the national medium-term development plan and legislative agenda for effective governance in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 226–252. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.226-252>
- Hasibuan, H. S., & Mulyani, M. (2022). Transit-oriented development: Towards achieving sustainable transport and urban development in Jakarta Metropolitan, Indonesia. *Sustainability*, 14(9), 5244. <https://doi.org/10.3390/su14095244>
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (5th ed.). Sage Publications.
- Howlett, M., Mukherjee, I., & Woo, J. J. (2023). *Routledge Handbook of Policy Design*. Routledge.
- IDN Times. (2024). *Dibongkar Anies, dibangun lagi: JPO Sarinah tuai kritik*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dibongkar-anies-baswedan-dan-dibangun-pramono-jpo-sarinah-tuai-kritik>
- Iswahyudi, F., Hadna, A. H., Darwin, M., & Kutanegara, P. M. (2021). The determinant of policy termination post-leadership succession in Indonesia context. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(2), 212–226. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31154>
- Kim, S., & Lee, J. (2021). Urban Policy Sustainability and Political Leadership: Evidence from Metropolitan Governance. *Cities*, 118, 103344.
- Liputan6. (2024). *JPO Sarinah diresmikan, kini ramah disabilitas dan lansia*. <https://www.liputan6.com/news/read/6289396/pramono-anung-resmikan-jpo-sarinah-jadi-ramah-disabilitas-dan-lansia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, A. M., Sihombing, A. V. R., Hendrawan, H., Vitriana, A., & Nugroho, A. (2022). Walkability and importance assessment of pedestrian facilities on central business district in capital city of Indonesia. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 16, 100695. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100695>
- Mulyadi, A. M., Santosa, W., & Salura, P. (2024). Measuring walkability on pedestrian facilities in Jakarta by using modified Global Walkability Index. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 15, 1910–1927. <https://doi.org/10.11175/easts.15.1910>
- Napitupulu, D. M. R., & Rudiarto, I. (2025). The impact of transit oriented development on walkability: A case study of Dukuh Atas Station, Jakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 21(1), 113–129. <https://doi.org/10.14710/pwk.v21i1.52284>
- Peters, B. G. (2015). *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar Publishing.
- Peters, B. G. (2021). *Policy Problems and Policy Design*. Edward Elgar Publishing.
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the sustainable development goals into a regional development plan in Indonesia. *Sustainability*, 16(23), 10235. <https://doi.org/10.3390/su162310235>
- Rodrigues, M., & Pires, A. (2022). Policy Continuity in Urban Infrastructure Projects: Challenges and Governance Mechanisms. *Urban Affairs Review*, 58(6), 1452–1475.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Trein, P., Fischer, M., Maggetti, M., & Sarti, F. (2023). Empirical research on policy integration: A review and new directions. *Policy Sciences*, 56(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09489-9>
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2023). *Theories of the Policy Process* (5th ed.). Routledge.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Sage Publications.